

Rekonstruksi Makna Pembangunan Manusia Menurut Bappenas

Ahmad Rifai^{1*}

¹Universitas Peradaban

*ahmadrifai09@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki pokok pembahasan pada permasalahan konsep pembangunan manusia selama era reformasi yang belum menjadi fokus sentral dalam pembangunan di Indonesia. Fakta ini menyebabkan banyaknya generasi penerus bangsa yang tidak memahami sejarah dan pentingnya Pancasila bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan negara. Untuk itu, dibutuhkan dasar sekaligus pondasi penting dari pembangunan manusia yang mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara benar dan konsekuen. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis konsep pembangunan manusia Indonesia yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap III tahun 2015-2019 dengan menggunakan tinjauan filsafat Pancasila. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep-konsep pembangunan yang telah disusun oleh Bappenas yang termaktub dalam RPJMN 2015-2019. Rekonstruksi makna pembangunan manusia menurut Bappenas adalah: *Pertama*, Pancasila sebagai dasar falsafah negara tidak bisa dipengaruhi oleh segala perbedaan seperti keagamaan, kesukuan, kewarganegaraan, golongan, dan sebagainya. Demikian pula Pancasila tidak dapat dipengaruhi oleh segala perubahan, seperti perubahan keadaan, peristiwa, tempat (dalam dan luar Indonesia), waktu, komposisi penduduk, pola hubungan antar warga, bangsa, dan negara, dan hubungan-hubungan lainnya. *Kedua*, dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, manusia Indonesia harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia sebagai "monopluralis". Unsur-unsur hakikat manusia monopluralis meliputi susunan kodrat manusia, baik jiwa ataupun raga, sifat kodrat manusia sebagai makhluk mandiri yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. *Ketiga*, paradigma pembangunan bangsa dan negara harus dalam suasana baru sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, tetapi tetap berada di dalam nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, karena manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai hak dasar yang sama, tidak dibedakan dengan keturunan, warna kulit, suku bangsa dan penggolongan lainnya.

Kata Kunci: Bappenas, Pembangunan Manusia, RPJMN

Abstract

This research has the subject matter of the concept of human development in the reform era which has not become a central focus in development in Indonesia. This fact causes many future generations to not understand the history and importance of Pancasila for the survival of the nation and state. For this reason, a foundation is needed as well as an important foundation for human development who is able to understand and practice the values of Pancasila correctly and consistently. This study is intended to analyze the concept of Indonesian human development as stated in the Phase III 2015-2019 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) using a review of the Pancasila philosophy. The main sources used in this research are the development concepts that have been prepared by Bappenas which are contained in the 2015-2019 RPJMN. The reconstruction of the meaning of human development according to Bappenas is: First, Pancasila as the basic philosophy of the state cannot be influenced by all differences such as religion, ethnicity, citizenship, class, and so on. Likewise, Pancasila cannot be influenced by any changes, such as changes in circumstances, events, places (inside and outside Indonesia), time, population structure, patterns of relations between citizens, nation and state, and other relationships. Second, in order to realize the goals of national development, Indonesian people must be returned to their basic human nature as "monopluralists". The monoplural elements of human nature include the composition of human nature, both body and soul, human nature as an independent being that stands alone and as a creature of God Almighty. Third, the paradigm of nation and state development must be in a new atmosphere in accordance with the latest advances in science and technology, but still in the basic values of Pancasila, namely the values of faith and devotion to God Almighty. just and civilized humanity. , because humans as God's creatures have the same basic rights, not differentiated based on descent, skin color, ethnicity and other classifications.

Keywords: Bappenas, Human Development, RPJMN

PENDAHULUAN

Bagi bangsa Indonesia, tujuan pembangunan nasional secara khusus telah digariskan dalam pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika tujuan yang dimandatkan oleh konstitusi ini disarikan, akan tampak bahwa mandat yang diberikan negara kepada para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara negara dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga ke lingkup dunia.

Pembangunan nasional menurut Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas, 2017: 17) adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat. Hakikat pembangunan ini mengandung makna bahwa pembangunan nasional mengejar keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah. Pembangunan nasional yang berkesinambungan dan merata diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa sehingga senantiasa mampu mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan hidup lahir dan batin. Hasil pembangunan nasional harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat dalam bentuk peningkatan taraf hidup dan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Karena bagaimana pun, kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan harus dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Pancasila.

Pembangunan adalah upaya sistematis dan terencana untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, karena masing-masing negara memiliki usia kedaulatan, sumber daya andalan dan tantangan yang berbeda.

Meski demikian, yang perlu menjadi perhatian dalam perspektif pembangunan adalah pembangunan yang humanis, yaitu pembangunan yang mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk yang aktif dan kreatif. Oleh karena itu, manusia mampu menentukan nasibnya sendiri (menentukan kebutuhan, menentukan apa yang harus dilakukan, menentukan langkah yang sudah diputuskan). Perspektif ini dimaksudkan untuk mencegah intervensi pembangunan yang merugikan dan memaksa; menumbuhkan sikap otonom, dan menghindarkan sikap ketergantungan. Pembangunan dalam hal ini harus mengandalkan human capital, yang mencakup intelektual capital, sebagai kekuatan pembangunan yang mandiri yang memungkinkan suatu rumah tangga untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman (Narayan, 2020: 53).

Pembangunan sesungguhnya mempunyai makna yang komprehensif yang mencakup aspek kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaannya dalam mengolah Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber daya lainnya. Orientasi pembangunan di Indonesia tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah seperti tercukupinya sandang, pangan, papan, kesehatan dan yang lainnya, melainkan juga pembangunan aspek-aspek batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas menyatakan pendapat, kehidupan yang demokratis dan seterusnya.

Kata pembangunan, dengan mengikuti pendapat Hobart (2019:7) memiliki padanan dengan kata *development*, karena kata tersebut mengacu pada tiga hal, yakni perkembangan, pembangunan, dan kemajuan, yang mengacu kepada ide politik, ide ekonomi liberal dan rasional. Dengan demikian, pembangunan bertujuan memampukan masyarakat dan individu sedapat mungkin menumbuhkan dan mengembangkan potensi intelektual, kerohanian, kognisi, dan mental. Definisi yang diberikan Mark Hobart ini membuka ruang yang lebih luas bagi berbagai dimensi pembangunan dan bahkan memberikan penekanan pada aspek-aspek *human capital* yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan.

Karena alasan di atas, maka diperlukan pemaknaan kembali terhadap konsep pembangunan yang ada saat ini. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional yang berarti bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai sila Pancasila. Hal ini sebagai konsekuensi asas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional karena hakikat nilai sila-sila Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai subjek pendukung pokok negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui kajian kepustakaan. Penelitian kualitatif merupakan kajian berbagai studi dan kumpulan berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personal, pengakuan introspeksi, kisah hidup, wawancara, artefak, berbagai teks dan produk kultural, pengamatan, sejarah, interaksional, dan berbagai teks visual (Santana, 2020:5). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengambil topik masalah konsep pembangunan manusia di Indonesia yang termuat dalam dokumen pemerintah berupa RPJMN 2015-2019.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis dengan menggunakan alat analisis metodelis berupa kesinambungan historis, interpretasi dan heuristik atau penemuan baru. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep-konsep pembangunan yang telah disusun oleh Bappenas yang termaktub dalam RPJMN 2015-2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Salah satu agenda dalam pembangunan nasional adalah dengan penancangan program RPJMN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2015- 2019, disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan agenda (*Nawa Cita*) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan rancangan teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005–2025 (Kementerian PPN/ Bappenas, 2014: 2).

Diantara misi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah “*Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembang-kan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa*” (Kementerian PPN/ Bappenas, 2014: Bab 2 hal. 1).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai penanggung jawab program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) mengungkapkan bahwa salah satu dari tiga pokok masalah bangsa adalah permasalahan Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Alasannya seperti tertulis dalam agenda pembangunan nasional yang mengatakan:

“...Politik penyeragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa pejuang, memudarkan solidaritas dan gotong-royong, serta meminggirkan kebudayaan lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi. Negara abai dalam menghormati dan mengelola keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Sikap untuk tidak bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang

beragam telah melahirkan ekspresi intoleransi dalam bentuk kebencian, permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap “yang berbeda”. Kegagalan pengelolaan keragaman itu terkait dengan masalah ketidakadilan dalam alokasi dan distribusi sumber daya nasional yang memperuncing kesenjangan sosial (Kementerian PPN/ Bappenas, 2014: Bab 2 hal. 5).

Berdasarkan pada pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang dicapai melalui pengendalian penduduk, peningkatan taraf pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Tantangan pembangunan SDM meliputi:

- a. Tantangan dalam pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat adalah meningkatkan upaya promotif dan preventif; meningkatkan pelayanan kesehatan ibu anak, perbaikan gizi (spesifik dan sensitif), mengendalikan penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Disamping itu pembangunan kesehatan juga dihadapkan pada upaya untuk menurunkan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan. Secara khusus tantangan utama dalam lima tahun ke depan adalah dalam meningkatkan kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional, penyiapan provider dan pengelolaan jaminan kesehatan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional;
- b. Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas, dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin, dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu; serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, tantangan yang dihadapi adalah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran dan sistem penilaian dalam pendidikan;
- c. Tantangan utama yang dihadapi dalam rangka memperkuat karakter dan jatidiri bangsa adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bahasa, adat, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa; meningkatkan promosi budaya antar daerah dan diplomasi budaya antarnegara; dan meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya;
- d. Tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan adalah meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah; dan
- e. Tantangan dalam peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya adalah merubah sikap permisif masyarakat dan praktek budaya yang toleran terhadap kekerasan dan perlakuan salah lainnya, serta melaksanakan sistem perlindungan perempuan dan anak secara terkoordinasi dan menyeluruh mulai dari upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi (Kementerian PPN/ Bappenas, 2014: Bab 2 hal. 13-16).

Dengan mengacu pada pandangan di atas, maka pembangunan di Indonesia seharusnya tidak lepas dari landasan Pancasila sebagai logika dasar dari pembangunan tersebut. Karena itu Pancasila dalam pembangunan perlu ditempatkan sebagai kategori tematis yang mempunyai implikasi bahwa Pancasila dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis. Pengembangan kreatif dan dinamis harus tetap bersumber pada hakikat keberadaan manusia. Heidegger berpendapat bahwa inti adanya manusia terletak dalam eksistensinya. Manusia berada dalam eksistensinya. Manusia berada pada dirinya sendiri dirasakan dan disadari oleh setiap orang. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia selalu berpusat pada kesadaran manusia tentang dirinya, sehingga seluruh hidup dan kehidupannya dialami sebagai bagian dari dirinya. Hal ini dimaksud sebagai dimensi imanen. Selain itu manusia dapat keluar dari dirinya. Manusia tidak hanya hidup dalam batin saja tetapi yang dirasakan dalam batin itu merupakan yang ada di luar dirinya, yaitu dalam dunia. Dengan demikian manusia mempunyai dimensi yang melampaui dirinya, inilah yang disebut dimensi transendensi (Huijbers, 2019: 51).

Human Development Report menekankan lima landasan bagi tercapainya suatu pembangunan yang berorientasi pada manusia (Abdullah, 2017: 6-8): Pertama, *equal citizenship* yang menunjuk pada suatu kesetaraan antarwarga, baik dalam arti kesempatan maupun dalam pengembangan kapasitas dan keahlian serta hak-hak yang mengikutinya sebagai warga negara. Penganut pandangan struktural berpendapat pemenuhan hak-hak ekonomi, termasuk di dalamnya hak atas pekerjaan, hanya akan tercipta jika dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh negara, diawali dengan prakondisi sosial yang kondusif yang sekaligus berfungsi sebagai landasan bagi terlaksananya perubahan sosial (Budiman, 2019: 75).

Pembangunan berimplikasi pada persoalan pengangguran, indikatornya adalah terjadinya penurunan jumlah pekerja produktif yang cukup drastis, yaitu dari 62 persen pada tahun 1971 menjadi hanya 50 persen pada tahun 1990. Implikasinya adalah terjadi peningkatan jumlah pengangguran terselubung dari 19 juta jiwa atau 38 persen dari angkatan kerja pada tahun 1971 meningkat menjadi 31 juta jiwa atau mendekati 50 persen dari angkatan kerja 1990. Kondisi ini menunjukkan pembangunan yang dilakukan selama periode tersebut ternyata gagal memperluas kesempatan kerja seiring dengan pertambahan angkatan kerja. Dari jumlah 107,2 juta angkatan kerja (48,7 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2005), diperkirakan 9,6 juta adalah pengangguran atau para pencari kerja (Pitoyo, 2017: 181).

Kedua, *the sosial minimum* yang menunjuk pada batas minimal bagi pembangunan manusia, dalam artian terpenuhinya setiap keperluan mendasar setiap manusia. Batasnya adalah kemampuan untuk bertahan hidup, terhindar dari rasa terasing, dan terhindar dari rasa duka. Pada kebutuhan badaniah misalnya, manusia minimal mendapatkan asupan air sebanyak 20 liter per hari untuk memenuhi segala kebutuhannya. *Social minimum* terjadi ketika manusia mengalami kekurangan dan melakukan pengurangan terhadap berbagai pilihan, hingga pada batas kebutuhan subsisten, tidak adanya *saving*, investasi untuk keberlanjutan hari depan. Tanda kehidupan di bawah batas sosial minimum adalah ketika orang mengorbankan salah satu pilihan yang krusial (kebutuhan mendasar) demi sebuah kebutuhan mendasar lainnya. Oleh karena itu, pembangunan sangat terkait dengan rasa nyaman, aman, ketenangan, dan kepastian.

Ketiga, *equality of opportunity*, yang menegaskan bahwa setelah *the sosial minimum* terpenuhi, setiap masyarakat berhak mendapatkan kesejajaran kesempatan untuk nutrisi, udara, air, perlindungan, perubahan cuaca yang tiba-tiba, bencana, penyakit. Pada kondisi material, sebagai warga negara berhak mendapatkan lima hal, yakni *economis resources* (pendapatan dan kesejahteraan), *housing condition* (kondisi ruang rumah yang memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan); *working condition* (diukur dari standar kebisingan temperatur di tempat kerja dan jam kerja yang dijalani); *health* (variasi gejala stres dan hilangnya sakit dan penyakit serta tersedianya bantuan medis bagi masyarakat); dan *education* (pencapaian pendidikan formal). Pendekatan di atas merupakan modal dasar bagi pemberdayaan manusia. Semua orang berhak menerima pendidikan, akses kesehatan, sarana permukiman, dan sanitasi

yang layak. *Equality of opportunity* merupakan kunci dari keadilan sosial. Hilangnya keadilan disebabkan oleh beberapa hal, seperti sentralisasi negara, diskriminasi struktural yang diberlakukan oleh pemerintah, dan konflik yang tidak terkendali dan berkepanjangan.

Keempat, *fair distribution*, semua masyarakat berhak mendapatkan akses distribusi sumber daya dan kekayaan publik dengan adil. Jika resiprositas merupakan pertukaran antara individu atau antarkelompok yang bersifat horizontal, maka distribusi merupakan pertukaran vertikal antarmasyarakat dengan struktur yang mempunyai jabatan lebih tinggi. Sebagai misal adalah hubungan antara masyarakat dengan negara. Bentuk kerja sama dalam bentuk pajak yang diberikan rakyat diputar kembali dalam bentuk subsidi silang. Distribusi juga digunakan untuk pertukaran barang dan jasa yang ditandai dengan adanya pemusatan wewenang (ketua adat, kepala desa hingga lembaga agama). Bulog (Badan Urusan Logistik) dan BAZIS (Badan Amal Zakat Infaq dan Shadaqoh) yang menangani distribusi harus menganut prinsip-prinsip inklusif, bukan berdasarkan kepentingan-kepentingan yang menguntungkan segelintir orang.

Kelima, *sosial trust* yang merupakan harapan yang muncul dalam sebuah komunitas yang berperilaku normal, jujur, kooperatif, berdasarkan norma-norma yang dimiliki bersama demi kepentingan anggota yang lain dari komunitas tersebut. Masyarakat low sosial trust terindikasi dari kerja sama dalam bentuk- bentuk kebijakan formal yang dilaksanakan dengan cara wajib, bahkan koersif, seperti pajak yang tidak harus dibayar oleh komunitas yang mempunyai high sosial trust. Filosofi pembangunan sebenarnya menyangkut pertanyaan yang mendasar bukan hanya tentang ‘untuk apa’ pembangunan itu dilakukan, tetapi juga ‘dari siapa’ pembangunan itu berasal. Kepentingan manusia harus pula, selain dipahami sungguh-sungguh, diperhatikan di dalam ‘pelaksanaan’ pembangunan itu. Tingkat kepercayaan yang pada gilirannya akan menjadi sumber bagi pembangunan dan keberlanjutan pembangunan itu.

Arah dan Strategi Pembangunan

Salah satu dimensi dalam agenda pembangunan nasional di Indonesia adalah pembangunan manusia dan masyarakat. Adapun dasar dan tujuan dari konsep pembangunan tersebut adalah pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif.

Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama (Kementerian PPN/ Bappenas, 2014: Bab 5 hal. 2).

Diantara strategi yang diterapkan dalam agenda pembangunan yang berkualitas adalah menciptakan kondisi *sosial*, politik, hukum, dan keamanan yang stabil. Kondisi tersebut antara lain permasalahan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta permasalahan tata kelola dan reformasi birokrasi (Kementerian PPN/ Bappenas, 2014: Bab 5 hal. 3).

Salah satu arah kebijakan umum pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan (Kementerian PPN/ Bappenas, 2014: Bab 5 hal. 15).

Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dilaksanakan melalui 4 sub agenda prioritas: (1) pembangunan kependudukan dan keluarga berencana; (2) pembangunan pendidikan, khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar; (3) pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat; dan (4) peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program Indonesia Kerja (Kementerian PPN/ Bappenas, 2014: Bab 6 hal. 64).

Berkaitan dengan relasi pembangunan nasional dalam berbagai bidang yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia secara konsisten berdasarkan pada nilai-nilai hakikat kodrat manusia Indonesia. Pembangunan nasional harus memenuhi aspek jiwa (rohani) yang mencakup akal, rasa dan kehendak; aspek raga (jasmani), aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi dan juga aspek kehidupannya. Hal tersebut diimplementasikan dan dijabarkan dalam berbagai bidang pembangunan antara lain politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial, budaya, iptek, serta bidang kehidupan keagamaan (Kaelan, 2018: 227-228).

KESIMPULAN

Paradigma pembangunan bangsa dan negara harus dalam suasana baru sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, tetapi tetap berada di dalam nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, karena manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai hak dasar yang sama, tidak dibedakan dengan keturunan, warna kulit, suku bangsa dan penggolongan lainnya. Bagaimana pun, pembangunan nasional harus diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, baik aspek individual, aspek sosial, maupun aspek religiusnya. Atas dasar ini, pembangunan harus mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan.

Karena itu, Pancasila sebagai dasar falsafah negara tidak bisa dipengaruhi oleh segala perbedaan seperti keagamaan, kesukuan, kewarganegaraan, golongan, dan sebagainya. Demikian pula Pancasila tidak dapat dipengaruhi oleh segala perubahan, seperti perubahan keadaan, peristiwa, tempat (dalam dan luar Indonesia), waktu, komposisi penduduk, pola hubungan antar warga, bangsa, dan negara, dan hubungan-hubungan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, 2017. "Pembangunan Manusia; Filosofi dan Praksis Pembangunan yang Bermartabat," *Jurnal Populasi No. 18, Vol. 1, 2017*. Hal. 97-105
- _____, 2017. "Pemberdayaan masyarakat lemah dan tertinggal", dalam Tukiran, P. M. Kutaneegara dkk. (ed.), *Sumber Daya Manusia: Tantangan Masa Depan*. Yogyakarta: Kerja sama Pustaka Pelajar dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Budiman, Arief. 2019. "Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi", dalam INFID, *Pembangunan di Indonesia: Memandang dari Sisi Lain*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan INFID.
- Hobart, M. 2019. *Anthropological Critique of development: The Growth of Ignorance*. London and New York: Routledge.
- Huijbers, Theo, 2019. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kaelan, 2018, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.
- Kementerian PPN/ Bappenas. 2014. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015*

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Lemhanas, 2017, *Pembangunan Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka-Lemhanas.

Narayan, Deepa. 2020. *Voices of the Poor: Can Everyone Hear Us?*. New York: Oxford University Press.

Pitoyo, Agus Joko. 2017. "Pengangguran dan kebijakan penanganan" dalam Tukiran, P. M. Kutanegara dkk. (ed.), *Sumber Daya Manusia: Tantangan Masa Depan*. Yogyakarta: Kerja sama Pustaka Pelajar dan Pusat Studi Kependudukan Kebijakan Universitas Gadjah Mada

Santana, Septiawan K. 2020. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.